

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

Dalam hal ini landasan teori berperan sebagai konstruksi dasar dalam membuat penelitian terkait pemahaman, abstraksi, dan pola pemikiran dalam tulisan ini. Landasan teori juga memiliki urgensi sebagai satu kesatuan dalam membentuk pola-pola pengembangan materi.

1. Dikotomi Ruang Publik Dan Ruang Privat

Definisi dikotomi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki interpretasi, bahwasannya dikotomi dapat diartikan sebagai pembagian dimensi yang secara kontras membagi dua hal dengan garis yang berbeda. Perempuan memiliki dua dimensi yang seakan-akan menjadi konsep dikotomi dalam ranah yang lebih praksis. Perempuan sebagai pejabat publik yang memiliki peran di dunia publik sebagai anggota legislatif dan perempuan diruang privat sebagai istri dan ibu dalam lingkungan keluarga. Dikotomi ruang publik dan ruang privat tidak memberikan suatu bentuk perbedaan yang signifikan dalam segi konsep dan teori. Tapi pada praktiknya, dikotomi tersebut melahirkan stigmatisasi dan tindakan ketidakadilan bagi perempuan.

Ruang publik dapat diartikan sebagai sebuah dunia dengan jelas menetapkan sejumlah peraturan yang menggunakan parameter rasional. Sementara dalam ruang privat, tidak memiliki aturan yang baku, abstrak dan kondisi ideal dan alamiah yang cenderung emosional. Ruang privat bergerak

seperti pemikiran konservatif. Pemikiran tersebut mengakibatkan kompleksitas problematika yang muncul, dan terkesan tidak dianggap sebagai suatu urgensi dan tidak dianggap penting. Eksistensi ruang privat tidak seperti ruang publik. Contohnya ibu rumah tangga, seringkali diibaratkan "ratu" rumah tangga, pekerjaan rumah tangga (Ruang Privat) adalah pekerjaan mulia, namun realita mengatakan bahwa kalimat-kalimat tersebut hanyalah merupakan hiasan bibir belaka dan tidak menciptakan glorifikasi ataupun pengakuan berlebih. Hal ini dikarenakan oleh keengganan laki-laki untuk terlibat dalam ruang privat. Kondisi dikotomi ruang publik dan ruang privat tidak mencerminkan gelombang modernisasi dan transformasi pemikiran. Hal ini didukung oleh elemen-elemen yang secara tidak langsung turut melestarikan dikotomi tersebut, seperti pembingkai media ataupun pemberitaan media yang memiliki pola yang sama. Hal yang paling ekstensif tentunya menciptakan paradigma perempuan yang ter subordinasi, termarginalisasi, dan terdiskriminasi, baik diruang publik maupun diruang privat.

2. Gender Dan Politik

Menurut Mansour Fakh (2013: 7-8), gender merupakan berasal dari Bahasa Inggris, dari kata *sex* dan *gender*. Tetapi antara dua kata tersebut memiliki interpretasi yang berbeda. Jenis kelamin kerap kali diidentikkan dengan nilai biologis manusia. Sementara gender adalah sesuatu yang dihasilkan melalui mekanisme konstruksi sosial yang terkandung melalui sistem sosial dan interaksi sosial yang kemudian menjadi nilai.

Mansour Fakih (2013: 13-23) mengatakan bahwa gender ada empat bagian yaitu:

a. Gender Dan Marginalisasi Perempuan

Marginalisasi merupakan pengeyampingan terhadap perempuan dalam berbagai aspek bidang, dari mulai pekerjaan sehingga kedalam urusan rumah tangga. Dimana marginalisasi ini membuat posisi perempuan menjadi posisi kedua setelah laki-laki. Marginalisasi ini telah menjadi kultur dan budaya di Indonesia. Bahkan telah menjadi adat istiadat yang telah turun menurun mendarah daging dimasyarakat Indonesia. Proses terhadap marginalisasi ini dapat dilihat dari segi kebijakan pemerintah, keyakinan, agama, tradisi, kebiasaan, bahkan hingga keasumsi ilmu pengetahuan.

b. Gender Dan Subordinasi

Dimana dalam pandangan ini perempuan dianggap hanya memiliki perasaan atau emosional dalam berkehidupan. Perempuan juga dianggap irasional yang akhirnya menimbulkan kurangnya kepercayaan terhadap perempuan untuk memimpin, sehingga perempuan pun dianggap tidak penting. Dengan adanya subordinasi terhadap perempuan ini menyebabkan adanya stigma bahwasannya perempuan itu hanya akan menjadi ibu rumah tangga saja yang melayani suaminya.

c. Gender Dan Stereotipe

Stereotipe ini merupakan sebuah pelabelan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat terhadap kelompok lainnya atau satu individu ke individu lainnya. Stereotipe ini dapat menyebabkan pandangan dan stigma-stigma masyarakat terhadap suatu kelompok. Dalam hal ini pembahasan perempuan di masyarakat Indonesia sendiri stereotipe terhadap perempuan masih sangat keras. Dimana perempuan ini diibaratkan hanya sebagai pelayan bagi suaminya, yang artinya perempuan ini distereotipekan hanya sebagai sosok yang mengurus dapur atau rumah tangga saja. Hal ini menyebabkan bahwasannya perempuan dianggap tidak penting atau tidak harus mengenyam pendidikan tinggi.

d. Gender Dan Beban Kerja

Dalam kajian beban kerja ini mengibaratkan bahwasannya laki-laki itu bekerja diluar rumah untuk mencari nafkah, sedangkan perempuan atau istri diibaratkan hanya mengurus rumah, anak dan suaminya. Tetapi dalam hal beban kerja ini dimana perempuan yang bekerja diluar rumah itu harus juga mengurus pekerjaan yang ada dirumah sebaliknya dengan laki-laki. Ketika laki-laki bekerja diluar rumah dia tidak diharuskan atau tidak diwajibkan untuk mengurus rumah. Jadi hal beban kerja ini hanya terjadi terhadap perempuan khususnya bagi kalangan ekonomi menengah kebawah. Dimana perempuan-perempuan yang berada dikalangan ekonomi menengah kebawah memiliki beban kerja yang cukup berat.

Dimana mereka harus mencari nafkah untuk keluarganya dan dilain sisi juga harus mengurus urusan rumah tangganya.

Istilah gender merupakan satu bentuk realita dan konstruksi sosial yang memberikan pengertian dimensi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam perilaku, nilai, dan norma. Joan Scott mendefinisikan gender memuat poin-poin integral dalam hubungan masyarakat yang mencari nilai-nilai baik dan buruk bagi perempuan dan laki-laki, serta harapan terhadap pengaruh yang dimainkan perempuan dan laki-laki dimasyarakat. Dalam kerangka yang lain, gender adalah tentang maskulinitas dan feminitas. Sifat-sifat ini akan terus bergerak dinamis dan fluktuatif (Nur Azizah, 2017: 4-5).

Konsep Gender pertama kali diperkenalkan oleh (Robbert Stoller, 1968:2) tentang eksistensi dan pencurian manusia yang dibedakan secara alamiah berdasarkan jenis kelamin, fisik dan biologis sebelum bicara lebih jauh tentang sifat dan perilaku atau konsep yang masih berkaitan yang mengatakan bahwa gender itu sifat atau perilaku seseorang yang dilihat dari jenis kelaminnya. Ada juga ilmuwan lain yang sangat berperan penting terhadap konsep gender ini yaitu (Ann Oakley, 1972:3). Stoller dan Oakley juga mendefinisikan gender sebagai kontruksi sosial yang dipakai manusia dan dibangun oleh kebudayaan manusia (Nugroho, 2008:2).

Istilah baru kemudian bermunculan, beriringan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan politik yaitu munculnya istilah gender dan politik. Gender dan politik adalah pemanfaatan hubungan gender untuk kepentingan politik. Pemanfaatan ini bisa dilakukan dalam semua instrumen dan dimensi politik, baik itu negara, pemerintahan, birokrasi, partai politik, ataupun aktifitas politik lainnya. Gender dan politik dilakukan untuk bisa memberikan ruang dan kesempatan guna terciptanya kesamaan paradigma antara laki-laki dan perempuan terhadap politik (Nur Azizah, 2017:137).

Gender dan politik adalah konsep utama yang mempengaruhi terhadap seluruh konstelasi lainnya yaitu pendidikan, ekonomi, keamanan dan sebagainya. Konsep politik yaitu mengacu pada hubungan kekuasaan dalam konsep yang luas, bukan sekedar pada tatanan politik praktis, namun pada masyarakat umum diberbagai kategori berbeda yang masuk dalam variannya seperti gender, kelas, golongan usia, etnisitas, dan sebagainya. Gender adalah unsur yang dominan dalam definisi politik definisi politik tersebut maupun dalam kehidupan skala makro.

Dalam hal yang paling sederhana, seperti dalam lingkungan sosial dikeluarga, antara laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri merupakan konsep gender dan politik yang diejawantahkan dalam konsep pembagian kelas. Ini adalah konsep gender dan politik yang paling sederhana. Konsep dikeluarga ini menunjukkan harus terciptanya keserasian dan keseimbangan dalam membuat manajerial negara. Dengan

refleksi tidak boleh menyudutkan salah satu pihak, suami dan istri harus memiliki peranan yang seimbang.

Gender adalah keserasian dan keseimbangan pembagian peran antara laki-laki dan perempuan. Dimana peran-peran tersebut harusnya baik perempuan maupun laki-laki memiliki hak dan kewajiban yang sama sesuai dengan kemampuan individunya masing-masing, tidak membuat stigma atau melemahkan satu pihak.

Jadi istilah gender dan politik ini dapat memiliki konklusi bahwa gender dan politik merupakan ciri dan citra sosial yang dibangun atas kebudayaan yang melekat pada kehidupan. Konsep feminisme ialah bahwa kondisi perempuan, pembagian peran laki-laki dan perempuan dalam masyarakat adalah bentukan masyarakat yang memiliki pola terstruktur namun fluktuatif dan bisa berubah-ubah secara kondisional. Feminisme adalah gerakan budaya dan gerakan politik transformatif yang mengubah cara berpikir perempuan serta mengubah tatanan hubungan antara perempuan dan laki-laki didalam keluarga dan masyarakat.

3. Perempuan Dan Politik

Menurut Siti Musdah (2005:17) mengatakan bahwasannya perempuan dan politik adalah dua dimensi yang berbeda dan sampai kapanpun tidak bisa disatukan. Pola-pola pemikiran tersebutlah yang melanggengkan tradisi patriarki dan dominasi laki-laki yang menghegemoni struktur kehidupan. Dengan

sendirinya pemikiran-pemikiran tersebut menjadi cikal bakal stereotype dan stigmatisasi yang berkelanjutan.

Perempuan dan politik merupakan sikap perempuan untuk ikut dalam eskalasi politik, terutama dalam membuat dan memengaruhi kebijakan. Terutama hal-hal yang berkaitan dengan dinamika politik seperti partisipasi dalam pemilu maupun pilkada, aktif dalam menyuarakan keadilan, ikut memengaruhi kebijakan bahkan hal yang paling empirik seperti mengikuti kampanye partai politik dengan gaya dan paradigma khas perempuan yang memiliki kekhasan tersendiri. Hal ini bisa menginisiasi untuk terciptanya persamaan, dan ketidakadilan terhadap perempuan yang selama ini terjadi akibat praktek ideologi patriarki bisa diatasi (Karam Azza, 2000: 17).

Dalam kepribadian perempuan yang selalu mengedepankan perasaan membuat cara berpikir perempuan dalam politik selalu berhati-hati dan tidak melakukan hal yang ceroboh, dikarenakan sifat murni dari perempuan yang selalu menggunakan perasaan membuat perspektif perempuan lebih mengutamakan hati nuraninya dibanding dengan tekad perempuan dalam menjalankan sebuah kebijakan politik. Maka dari itu peranan perempuan sangat penting untuk bisa dijadikan faktor keseimbangan dalam dunia politik.

Dilihat dari konsep mengenai dunia politik sudah terlihat jelas bahwasannya perempuan dan laki-laki memiliki perbedaan dari pemahaman kepemimpinan serta mempunyai prinsip kepribadian yang berbeda. Biasanya

perempuan lebih mengedepankan sifat feminismenya yang cenderung kepada kasih sayang dalam berpikir politik.

Posisi perempuan dalam ranah politik sangat diperlukan, tetapi diranah publik peran perempuan terdapat adanya diskriminasi dari kalangan yang lain, selalu saja mendapatkan perlakuan yang selalu merendahkan kaum perempuan, padahal dalam dunia politik siapapun bisa menjadi bagian dari dunia politik tanpa adanya ketimpangan sosial.

Perempuan dan politik sering dijadikan slogan dalam kampanye atau ketika dalam perhelatan politik pemilihan umum ataupun pemilihan daerah. Kepentingan serta keinginan perempuan yang berbeda dengan laki-laki membuat perempuan pun mempunyai ciri khasnya dalam berpikir politik. Apalagi untuk sekarang keberpihakan terhadap perempuan yang masih kurang, membuat para perempuan pun mengambil keputusan serta berpikir untuk kesetaraan hak perempuan dan laki-laki itu sama.

Secara umum persoalan seperti ini terjadi dikarenakan kultur serta pemahaman tentang agama yang merupakan faktor klasik yang membuat perempuan masih dianggap yang paling lemah, apalagi emosional perempuan dalam bermasyarakat yang tidak bisa dikontrol serta bentuk sikap kemasyarakatannya yang masih dianggap tidak terlalu bagus seperti para laki-laki. Padahal itu hanya alasan saja yang dikambing hitamkan terhadap perempuan, sebenarnya perempuan pun dapat melakukan hal yang dilakukan

oleh laki-laki yang biasanya disebut dengan *emansipasi* yang mempunyai kesetaraan dalam hal apapun dengan laki-laki.

Tetapi dengan semakinnya berkembang jaman serta pola pikir yang lebih maju, maka perempuan pun kini dianggap menjadi salah satu faktor dalam keberhasilan serta keberagaman dalam dunia politik, dengan cara pandang yang cenderung dikaitkan dengan kasih sayang, maka perempuan pun dapat menarik kepercayaan dari masyarakat ataupun bisa menjadikan perempuan sebagai sosok panutan dalam pemikiran politiknya.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

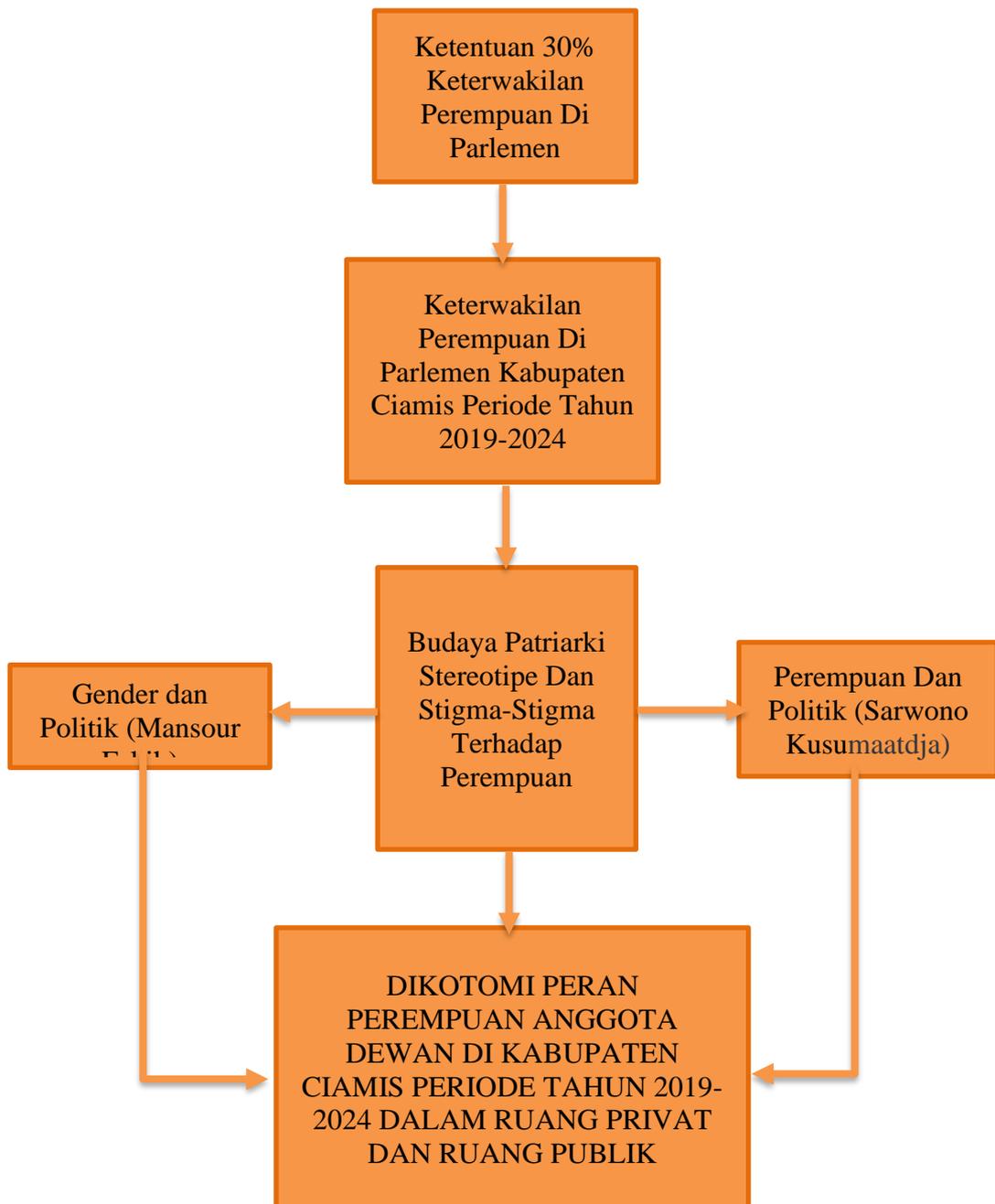
No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Edi Kusmayadi, Fitriyani Yuliawati, Wiwi Widiastuti (Universitas Siliwangi 2011).	Perempuan Dan Politik, Dikotomi Antara Ruang Privat Dan Ruang Publik (Studi Kasus: Anggota Legislatif Terpilih DPRD Kota Tasikmalaya Periode 2009-2014).	-Mengenai perempuan dan politik. -Meneliti bagaimana peran anggota parlemen perempuan diruang privat dan diruang publik. -Menggunakan teori gender dan politik. -Menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. -Studi kasus yang diteliti.	-Lokasi penelitian di Kota Tasikmalaya Periode Tahun 2009-2014.

2.	Dwi Edi Wibowo (Universitas Pekalongan, 2011)	Peran Ganda Perempuan Dan Kesetaraan Gender.	<ul style="list-style-type: none"> -Mengenai perempuan dan politik. -Menggunakan teori gender dan politik. -Menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. -Studi kasus yang diteliti. 	-Fokus penelitian terhadap implikasi sosial migrasi tenaga kerja perempuan
3.	Rosdalina Bukido (Al-Syir'ah, 2006).	Dikotomi Gender (Sebuah Tinjauan Sosiologis).	<ul style="list-style-type: none"> -Mengenai perempuan dan politik. -Menggunakan teori gender dan politik. -Menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. -Studi kasus yang diteliti. 	-Fokus penelitian terhadap marginalisasi dan diskriminasi terhadap perempuan dalam bidang dunia kerja

C. Kerangka Pemikiran

Gambar 2. 1

Kerangka Pemikiran



Keterangan:

Ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan di parlemen telah tertuang didalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Pasal 55 Ayat 2, akan tetapi pada kenyataannya di Kabupaten Ciamis hanya mencapai 10% keterwakilan perempuan di parlemen, yang terdiri dari lima anggota parlemen perempuan diperiode tahun 2019-2024 ini. Dilingkungan yang masih kental akan budaya patriarkinya, *stereotype* dan stigma-stigma negatif terhadap pengembangan potensi dan pemberdayaan terhadap perempuan. Hal inilah yang membuat kajian terhadap bagaimana kelima anggota parlemen perempuan di Kabupaten Ciamis menjalani kehidupan peran ganda (Dikotomi) sebagai ibu rumah tangga dan juga sebagai anggota parlemen perempuan menarik untuk dianalisis. Oleh karena itu penulis ingin menganalisis mengenai **“DIKOTOMI PERAN PEREMPUAN ANGGOTA DEWAN DI KABUPATEN CIAMIS PERIODE TAHUN 2019-2024 DALAM RUANG PRIVAT DAN RUANG PUBLIK”**. Maka penelitian ini akan dianalisis menggunakan dua teori gender dan politik serta perempuan dan politik.